



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi serta pemanfaatan air dalam bidang pertanian maupun dalam bidang lainnya perlu pengaturan mengenai Irigasi;
- b. bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya berwenang mengatur Sistem Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Dewan Sumber Daya Air;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Dinas adalah instansi Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Irigasi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
12. Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air Irigasi.
15. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
16. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

18. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut Drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
19. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
20. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
21. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
23. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
25. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan Irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
26. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah desa.

27. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapya.
28. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
29. Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut P3A, adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
30. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
33. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Dharma Tirta tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan Irigasi tingkat kabupaten.
34. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
35. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.

36. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
37. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi.
38. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
39. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
41. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.
42. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air sungai yang dapat dipergunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk Irigasi maupun keperluan lainnya.
43. Waduk Lapangan Atau Embung adalah tempat/wadah penampungan air Irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN SERTA KEBERLANJUTAN  
SISTEM IRIGASI

Pasal 2

- (1) Sistem Irigasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, demokrasi, peranserta, berkeadilan, transparan, dan akuntabel.
- (2) Sistem Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.
- (3) Sistem Irigasi bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air Irigasi dan peningkatan produksi pertanian sehingga harus dipertahankan keberlanjutannya.
- (4) Keberlanjutan Sistem Irigasi dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian Sistem Irigasi agar dapat melindungi dan/atau mendukung petani dalam menjalankan profesi secara mandiri dan bermartabat.
- (5) Upaya untuk mempertahankan keberlanjutan Sistem Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan oleh :
  - a. keandalan air Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

- b. keandalan prasarana Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi; dan
  - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

### BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan dan/atau pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan seraya mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani agar dapat dicapai memanfaatkan Sistem Irigasi secara optimal.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A Dharma Tirta sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.

- (4) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.

#### BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

##### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan Irigasi tingkat Daerah.
- (2) Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta, komisi Irigasi kabupaten, atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A Dharma Tirta pada setiap Daerah layanan petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan dapat memberdayakan perempuan secara proporsional di dalam keanggotannya.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk gabungan P3A Dharma Tirta pada Daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, pada satu Daerah Irigasi.
- (5) Gabungan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Induk P3A Dharma Tirta pada Daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, pada satu Daerah Irigasi.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem Irigasi, yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati membentuk komisi Irigasi kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil P3A Dharma Tirta, wakil Pemerintah, dan wakil kelompok pengguna jaringan Irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Pembiayaan operasional komisi Irigasi kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi Irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam Sistem Irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Bentuk, wewenang, tugas, dan peran forum koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara dialogis oleh masing-masing pihak pengguna dan pemanfaat Sistem Irigasi yang bersangkutan dengan melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB V  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan Irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam kabupaten;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarDaerah Irigasi yang berada dalam kabupaten berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

- i. melaksanakan pemberdayaan P3A Dharma Tirta;
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada jaringan Irigasi primer dan sekunder dalam kabupaten; dan
- k. pembinaan dan pembangunan Irigasi pedesaan yang dibangun oleh Pemerintah desa.

#### Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah desa.

#### Pasal 11

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada jaringan Irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

## Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem Irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanismenya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PERANSERTA MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

## Pasal 14

- (1) Peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan dan rehabilitasi, sekaligus menjadikan kemandirian untuk menjaga keberlanjutan sistem Irigasi.

- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dana, dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya.
- (3) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (4) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem Irigasi.

#### Pasal 16

Pedoman pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah dilakukan secara partisipatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII PEMBERDAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta melalui penguatan, peningkatan kemampuan, dan peranserta aktif P3A Dharma Tirta.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A Dharma Tirta yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A Dharma Tirta sebagai pengelola Irigasi, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberdayaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

### Bagian Kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk Irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hak Guna Air Untuk Irigasi

### Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk Irigasi berupa hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk Irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Penggolongan usaha pertanian rakyat dan perusahaan di bidang pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pelaksana pengembangan Irigasi yang akan melaksanakan pembangunan system Irigasi baru atau peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana pengembangan Irigasi berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksana pengembangan Irigasi dapat melaksanakan pembangunan system Irigasi baru atau peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada.
- (4) Dalam rangka keberlanjutan Irigasi, izin prinsip alokasi air untuk pengembangan Irigasi dengan luasan Daerah Irigasi kurang dari 1.000 ha harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

- (5) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk Irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
  - a. P3A Dharma Tirta, untuk jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah atau oleh P3A Dharma Tirta; dan
  - b. badan usaha, badan sosial atau perseorangan, untuk jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.

#### Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk Irigasi bagi masyarakat petani termasuk bagi pertanian rakyat yang berada di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada, diberikan melalui P3A Dharma Tirta tanpa melalui prosedur perizinan.
- (2) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama, sedangkan air yang telah dipakai dibuang melalui saluran drainase dan apabila memenuhi persyaratan mutu digunakan kembali.
- (3) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk Irigasi bagi pertanian rakyat pada Sistem Irigasi baru dan Sistem Irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Dharma Tirta berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk Irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (6) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan, rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder, dan tersier.
- (7) Hak guna pakai air untuk Irigasi diberikan pada suatu Sistem Irigasi sesuai dengan luas Daerah Irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk Irigasi dievaluasi secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun oleh Bupati atau dinas sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati atau dinas sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk Irigasi.

## Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk Irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk Irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan Irigasi pertanian rakyat.

- (4) Hak guna usaha air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk Daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk Irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk Irigasi.

### Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk Irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk Irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

### Pasal 24

- (1) Penyediaan air Irigasi bagi pertanian rakyat dalam Sistem Irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.

- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk Irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air Irigasi bagi P3A Dharma Tirta.

## Pasal 25

- (1) Penyediaan air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
  - a. optimalisasi pemanfaatan air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
  - b. keandalan ketersediaan air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi dalam rangka penyediaan air Irigasi.
- (5) Untuk melaksanakan keandalan dalam penyediaan air seperti yang dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi Pemanfaatan Sumber Air Secara Seimbang.
- (6) Apabila ketersediaan air permukaan terbatas maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengoptimalkan penggunaan Air Tanah.

- (7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air Irigasi sehingga diperlukan substitusi air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi Irigasi.

#### Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pertanian dan Irigasi berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi lintas kabupaten dilaksanakan melalui kerjasama antara dinas Provinsi dengan dinas kabupaten terkait, dibahas dan disepakati oleh komisi Irigasi Provinsi serta ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam untuk Daerah Irigasi yang terletak dalam satu kabupaten dengan luasan 1.000 ha disusun oleh dinas kemudian dibahas dan disepakati oleh komisi Irigasi kabupaten untuk ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten disusun oleh dinas kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan pemakai air Irigasi lainnya.

- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi Irigasi kabupaten sesuai dengan Daerah Irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi Irigasi kabupaten dalam rapat komisi Irigasi yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk Irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk Irigasi, P3A Dharma Tirta menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

##### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi disusun oleh dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air Irigasi dan usulan P3A Dharma Tirta dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.

- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi Irigasi kabupaten sesuai dengan Daerah Irigasinya dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan air untuk Irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk Irigasi yang telah ditentukan; dan
  - b. kesepakatan dengan P3A Dharma Tirta di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembagian dan pemberian air Irigasi yang dimulai dari saluran primer, saluran sekunder sampai ke petak tersier dilakukan melalui bangunan bagi sadap dan bangunan sadap sesuai dengan rencana oleh pelaksana.

#### Pasal 29

- (1) Pembagian air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bagi-sadap wajib dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

## Pasal 30

- (1) Pengelolaan dan penggunaan air Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta dibantu oleh lembaga pengelola air lokal yang sudah ada.
- (2) Penggunaan air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Bupati Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal debit air Irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan dan merata secara bersamaan maka penggunaan airnya diatur secara bergilir oleh Dinas.

## Bagian Kelima Drainase

## Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Kelebihan air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

- (6) Pada wilayah-wilayah produksi pertanian tanaman pangan yang rawan banjir maka Pemerintah Daerah membuatkan fasilitas drainase serta peningkatan teknologi di bidang pertanian maupun Irigasi.

Bagian Keenam  
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

- (1) Penggunaan air untuk Irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk Irigasi di luar Daerah Irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Penggunaan air untuk Irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu  
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Pembangunan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

- (2) Pembangunan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Dharma Tirta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (4) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan Irigasi Daerah setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pembangunan jaringan Irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan Irigasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Peningkatan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Dharma Tirta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air.
- (3) Peningkatan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (4) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan Irigasi berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan Irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Bupati.
- (6) Tata cara pemberian izin peningkatan jaringan Irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan Irigasi seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Dharma Tirta yang bersangkutan.

#### Pasal 38

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian berIrigasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian berIrigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu  
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A Dharma Tirta dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A Dharma Tirta dapat melakukan pengawasan atas operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta, dan pengguna jaringan Irigasi di setiap Daerah Irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kompetensi petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan.
- (8) Pembiayaan tenaga operasi dan pembiayaan tenaga petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (9) Tata cara pemberian izin operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi seperti yang tercantum dalam ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A Dharma Tirta dan pengguna air lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan Irigasi.
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada P3A Dharma Tirta dan pengguna lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan atau rehabilitasi akibat terjadi keadaan darurat atau peningkatan jaringan Irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total maksimal selama 2 (dua) minggu secara berselang.

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi dilakukan pengamanan jaringan Irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Pemerintah, P3A Dharma Tirta, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 44

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan Irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan Irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan Irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Garis sempadan pada jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari batas luar tepi atas atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan pengairan yang ada dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran Irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih;

- b. 4 (empat) meter untuk saluran Irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik; dan
  - c. 3 (tiga) meter untuk saluran Irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik.
- (4) Garis sempadan jaringan Irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunannya dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran Irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran Irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik; dan
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran Irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik.
- (5) Untuk mencegah hilangnya air Irigasi dan rusaknya jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (6) Untuk keperluan pengamanan jaringan Irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, kecuali atas izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 45

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi, penetapan garis sempadan jaringan Irigasi, dan pengamanan jaringan Irigasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

### Pasal 46

- (1) Rehabilitasi jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi Irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A Dharma Tirta dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (4) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Dharma Tirta bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan Irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan Irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna lainnya.
- (7) Rehabilitasi jaringan Irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (8) Rehabilitasi jaringan Irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Dharma Tirta yang bersangkutan.
- (9) Rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

## BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 48

Pengelolaan aset Irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

## Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

### Pasal 49

- (1) Aset Irigasi terdiri dari jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Pendukung pengelolaan Sistem Irigasi terdiri atas fasilitas pendukung fisik operasional sistem Irigasi, lembaga pengelola Irigasi, sumber daya manusia dan aspek financial pendukung operasional pengelolaan sistem Irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan Irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan melaksanakan inventarisasi aset Irigasi dalam pengelolaan Irigasi.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Dharma Tirta, dan Pemerintah desa melakukan inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (8) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 50

- (1) Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) menjadi bagian dari sistem informasi Irigasi.
- (4) Sistem informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

## Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

## Pasal 51

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Dharma Tirta menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Dharma Tirta melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima  
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi (yang menjadi wewenang Daerah) setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Dharma Tirta membantu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Keenam  
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 54

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Penyusunan pedoman mengenai pengelolaan aset Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu membiayai pengembangan jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk pengembangan, pembangunan, peningkatan jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi tertentu.

## Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

### Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A Dharma Tirta berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A Dharma Tirta.

- (4) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan Irigasi dari para anggotanya. Aturan iuran pengelolaan Irigasi adalah sebagai berikut :
  - a. besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota P3A Dharma Tirta;
  - b. iuran pengelolaan Irigasi dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh pada Daerah Irigasi; dan
  - c. iuran pengelolaan Irigasi dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi tersier dan jaringan Irigasi lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A Dharma Tirta.

#### Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan dana pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai dana pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan Irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi oleh pengguna lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 (seribu) ha tetapi belum menjadi prioritas kabupaten, maka Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

#### Pasal 61

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 62

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten atas dasar asas proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB XIII  
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan Irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengendalikan alih fungsi lahan berIrigasi di Daerahnya.
- (2) Alih fungsi lahan berIrigasi hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan rencana tata ruang atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penataan ulang Sistem Irigasi dalam hal sebagian jaringan Irigasi beralih fungsi atau sebagian lahan berIrigasi beralih fungsi.

- (4) Alih fungsi lahan berIrigasi untuk kepentingan lain selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu Daerah Irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan Irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan berIrigasi baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur di dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

##### Pasal 64

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat Sistem Irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi antar Daerah Irigasi, antar wilayah administrasi terkait dan/atau antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Hubungan kerja antar komisi Irigasi dan hubungan kerja antara komisi Irigasi dan dewan sumber daya air Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan Daerah Irigasi yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah dan/atau Daerah Irigasi dengan luasan antara 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB XV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan system Irigasi diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di setiap Daerah Irigasi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan berIrigasi, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) P3A melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan system Irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

- (7) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka dan dapat diakses oleh umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan Irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI LARANGAN

### Pasal 66

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan Irigasi dilarang :

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak fungsi air Irigasi dan bangunannya;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunanbangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak yang berpotensi merusak jaringan Irigasi;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, brem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dengan cara apapun;

- h. mendirikan bangunan di wilayah Daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan Irigasi;
- i. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan kualitas air; dan
- j. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas Irigasi.

#### Pasal 67

- (1) Tanpa izin Bupati, dilarang :
- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap;
  - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain seperti yang tersebut pada huruf (a) yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran;
  - c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran Irigasi, waduk atau bangunan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan dan bangunan Irigasi;
  - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
  - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan Irigasi;
  - f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari Daerah Irigasi;
  - g. membudidayakan tanaman pada Daerah sempadan saluran; dan
  - h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi karena menyalahi penerapan prinsip-prinsip system pemanfaatan ulang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 68

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 67 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 67 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) selain dikenakan sanksi pencabutan izin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.

## BAB XVIII TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan Irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di wilayah pengelolaan Irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A atau gabungan dan induknya dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.

- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan Irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A atau gabungan atau induknya, badan sosial dan pengguna air Irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau pejabat penyidik polisi negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (6), Pasal 44 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 47 ayat (7), Pasal 64 ayat (4), Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 68 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Disamping dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan Irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 71

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum (POLRI) memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- c. Bagi jaringan Irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada P3A Dharma Tirta dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan Irigasi dengan ketentuan :
  1. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan Irigasi dinilai layak dan P3A Dharma Tirta menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahan tanggung jawab dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada P3A Dharma Tirta;

2. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan Irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan jaringan Irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  3. evaluasi pengelolaan Irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
  4. selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan Irigasi tetap dilakukan oleh P3A Dharma Tirta;
  5. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A Dharma Tirta; dan
  6. prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan Irigasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan P3A Dharma Tirta dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- d. Penyerahan pengelolaan Irigasi selain dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten kepada P3A Dharma Tirta disesuaikan dengan ketentuan :
1. bahwa pada jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A;
  2. apabila P3A Dharma Tirta tidak menyetujui pengelolaan pada jaringan Irigasi primer dan sekunder secara partisipatif, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  3. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-3-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 8-4-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013

### TENTANG

### IRIGASI

#### I. UMUM

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang Irigasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian Daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang Irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu

kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan Irigasi yang meliputi instansi Pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi Irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan Irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi Irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset Irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi. Pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset Irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi. Pemerintah kabupaten, atau Pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset Irigasi yang menjadi kewenangannya.

Mengingat Irigasi menyangkut berbagai pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi Pemerintahan, maka perlu dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi Irigasi.

Komisi Irigasi kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi dapat pula diselenggarakan forum koordinasi Daerah Irigasi yang difasilitasi oleh Bupati.

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah pengembangan dan pengelolaan Irigasi dilakukan secara musyawarah.

Yang dimaksud dengan “peranserta masyarakat” adalah suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara pemegang kebijakan lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi antara lain berupa pemikiran gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi melalui P3A Dharma Tirta bersamasama dengan Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, dan kemampuan P3A Dharma Tirta dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem Irigasi.

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan Irigasi

dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air Irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Yang dimaksud dengan "asas transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan Irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan Irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan Daerah.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" adalah pengembangan dan pengelolaan Irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketahanan pangan" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketahanan Pangan, adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian undang-undang tersebut lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagi masyarakat, bukan pada komoditinya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keberlanjutan dan pelestarian Sistem Irigasi tidak hanya usaha konservasi komponen artefak jaringan fisik Irigasi beserta lahan yang diairinya agar tidak berubah fungsi peruntukannya menjadi nonsawah Irigasi, tetapi juga keberlanjutan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “petani mandiri dan bermartabat” adalah petani yang bersangkutan dapat setara dengan profesi lainnya dari aspek psikologis, ekonomis maupun sosial serta mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh sebab itu kemandirian dan martabat petani tersebut perlu dilindungi oleh suatu peraturan hokum termasuk Peraturan Daerah ini.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air Irigasi” adalah kondisi/keadaan air Irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk Irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana Irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan Irigasi yang dapat memberikan pelayanan Irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- a. kegiatan pengamanan jaringan Irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan Irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan Irigasi; dan
- b. konservasi air di Daerah Irigasi yang berupaya untuk menghemat penggunaan air di Daerah Irigasi dan menjaga mutu air Irigasi pada jaringan Irigasi serta menjaga mutu kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keterlibatan perempuan di dalam keanggotaan P3A Dharma Tirta secara proporsional terkait dengan upaya pemberdayaan petani perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan Irigasi” adalah pemanfaat jaringan Irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)  
Tugas komisi Irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta Daerah Irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Forum koordinasi Daerah Irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A Dharma Tirta, wakil pengguna jaringan Irigasi, dan wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi Daerah Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Tanggung jawab Pemerintah kabupaten dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam bentuk bantuan teknis, penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh P3A Dharma Tirta, gabungan P3A Dharma Tirta atau Pemerintah desa.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Meskipun kewenangan Pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem Irigasi, tidak tertutup kemungkinan Pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan Irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A Dharma Tirta. Dalam hal P3A Dharma Tirta belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah kabupaten berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 12

Kerjasama yang disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem Irigasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyerahan wewenang Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem Irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada Pemerintah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peranserta masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Peranserta masyarakat petani juga dapat diwujudkan dengan keterlibatan petani wanita dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subyek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hokum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan Irigasi terpeliharanya dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan Sistem Irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pemberdayaan P3A Dharma Tirta bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A Dharma Tirta dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Hak Ulayat” adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan tersebut.

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah setempat.

Dalam pengertian “masyarakat hukum adat” termasuk juga ulu-ulu (petugas pembagi air) yang keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per ha.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk Irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.

Pengusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air Irigasi

untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi, usaha restoran perikanan, bisnis pertambangan, dll. Penetapan kriteria perizinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap lingkungan, peranserta petani setempat, dan ciri usaha tani yang dilakukan (misal padat karya).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksana pengembangan Irigasi”, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan Sistem Irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pelaksana pengembangan Irigasi sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah Irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem Irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air Irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” adalah kepentingan lain diluar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan Irigasi baru atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk Irigasi yang diperoleh P3A Dharma Tirta adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu Daerah Irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi Sistem Irigasi baru dan Sistem Irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Hak guna usaha air untuk Irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat. Termasuk didalamnya perusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air Irigasi untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi (buah naga), usaha restoran perikanan, bisnis pertambakan, dll. Penetapan kriteria perijinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap lingkungan, peran serta petani setempat, ciri usaha tani yang dilakukan (padat karya, mekanis, dll).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan Irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam. Evaluasi dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.  
Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)  
Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air Irigasi pada satu Daerah Irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu Daerah Irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air Irigasi antarDaerah Irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara Daerah Irigasi bagian hulu dengan Daerah Irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketersediaan air untuk Irigasi lebih diutamakan dengan memanfaatkan secara optimal air permukaan tanah. Namun demikian pada kondisi dan Daerah-Daerah tertentu dapat memanfaatkan juga air bawah tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten untuk Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk Irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A Dharma Tirta mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A Dharma Tirta dan komisi Irigasi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pelaksana” adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air Irigasi dalam satu Daerah Irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi” adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu Daerah Irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen. Rencana teknis bagi jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh dinas kabupaten yang membidangi Irigasi. Rencana teknis bagi jaringan Irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak tercukupinya penyediaan air Irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air Irigasi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Bentuk perkuatan teknologi pertanian, Irigasi dan drainase secara terpadu yang sudah banyak diterapkan di tingkat petani misalnya adalah lahan surjan.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan air untuk Irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan” misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan Irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan Irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan Irigasi air permukaan dan jaringan Irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan Irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan Irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan Irigasi air tanah berikut sumur dan instalansi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada Irigasi mikro, yang terdiri dari Irigasi tetes, dan Irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan kepada P3A Dharma Tirta oleh Pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A Dharma Tirta dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan Irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan Irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan Irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan Irigasi air permukaan dan jaringan Irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan Irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem Irigasi, antara lain dari Sistem Irigasi sederhana ke semi-teknis, dari Sistem Irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari Sistem Irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan Irigasi dapat dilakukan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan Irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan Irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan Irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 37

Ayat (1)  
Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan Irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan Irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 38

Ayat (1)  
Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian. Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian berIrigasi”, antara lain pencetakan sawah berIrigasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan Irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi Irigasi, P3A Dharma Tirta dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah kabupaten, P3A Dharma Tirta, dan pengguna jaringan Irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air Irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

#### Pasal 41

Termasuk dalam tanggung jawab P3A Dharma Tirta adalah jaringan Irigasi tersier, jaringan Irigasi desa, jaringan Irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam Irigasi mikro, dan bagian jaringan Irigasi yang dibangun oleh P3A Dharma Tirta.

#### Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air Irigasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah kabupaten dan P3A Dharma Tirta, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A Dharma Tirta dan pengguna jaringan Irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan Irigasi” adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan Irigasi.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “pihak lain” adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat diluar P3A Dharma Tirta.

Pasal 44

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluransaluran dan/atau bangunan jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan Irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan kebocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

Ayat (6)  
Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan Irigasi.

Pasal 45

Pedoman dimaksud antara lain, memuat metode, kriteria, dan atacara.

Pasal 46

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan Irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan Irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan Irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

#### Pasal 50

Ayat (1)  
Inventarisasi jaringan Irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan Irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

Ayat (2)  
Inventarisasi keseluruhan aset Irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang dimulai sejak saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset Irigasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 51

Ayat (1)  
Perencanaan pengelolaan aset Irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan Irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku,

memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan Irigasi dan aset Irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.

Pasal 54

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan Irigasi dan/atau pendukung pengelolaan Irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan Sistem Irigasi untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi yang berupa pencatatan jaringan Irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang

telah dibahas dengan melibatkan pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan Irigasi.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi tersier dari Pemerintah kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan Irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan Irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi tersier dari Pemerintah kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan Irigasi” adalah pengguna jalan inspeksi Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beserta penjelasannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Maksud “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antarDaerah Irigasi.

Dalam pelaksanaan koodinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi, komisi Irigasi kabupaten dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap Sistem Irigasi milik Pemerintah dan Sistem Irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan Irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dinas kabupaten yang mengelola Irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang disediakan meliputi Sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten, P3A Dharma Tirta, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 155